

# **SANKSI PIDANA SUATU GAGASAN TIGA SISTEM SANKSI (TRISISA) HUKUM PIDANA (Kajian Pidana Utama khusus Pidana Mati)**

Oleh : Ahmad Rifai Rahawarin<sup>1</sup>

**Abstrak:** Sanksi pidana merupakan salah satu proposisi dari trisisa hukum pidana yang memiliki dua konsep berupa pidana utama dan pidana pelengkap, pidana utama terdiri dari beberapa jenis sanksi, salah satunya pidana mati. Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun dengan konstitusi, namun pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dalam hukum Islam hanya berkaitan dengan tindak pidana yang menghilangkan nyawa, dan menghilangkan eksistensi negara atau pemerintah. Jadi dasarnya adalah semua tindak pidana yang menghilangkan nyawa dan menghilangkan eksistensi pemerintah pidana maksimalnya adalah sanksi pidana mati sedangkan pidana minimalnya adalah sanksi imbalan peniadaan.

**Kata Kunci :** Sanksi Pidana, Pidana Utama, Pidana Mati

## **PENDAHULUAN**

Hukum pencipta tidak ada bandingannya. Oleh karena pencipta maha mengetahui masa lalu, sekarang dan akan datang, paling mengerti kebutuhan, sifat, tabiat, kecenderungan dan segala aspek pada manusia ciptaan-Nya. Konsep tiga sistem sanksi (Trisisa) hukum pidana sebagai suatu gagasan yang merujuk pada hukum pencipta yang diyakini berupa hukum islam. Konsep ini menjadikan hukum islam sebagai dasar pijakan berfikir dengan sumber utama yaitu al-quran dan al-hadis.

Adanya kebutuhan sanksi hukum pidana dalam merespon tidak efektifnya sanksi pidana dalam pengurangi angka kriminalitas maka

---

<sup>1</sup> Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua

ditawarkanlah teori trisisa sebagai ide pembaharuan hukum pidana nasional. Sebelumnya dalam perkembangan sejarah hukum pidana, alasan pemidanaan dan teori-teori pemidanaan, dikenal adanya konsep *single track system berupa* sanksi pidana, akan tetapi selanjutnya dalam perkembangan sanksi pidana bukan hanya merupakan satu-satunya sanksi dalam hukum pidana, karena juga dikenal sanksi pidana dalam bentuk sanksi tindakan yang kemudian disebut dengan *double track system*. Teori Trisisa terdiri dari tiga proposisi yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan, dan sanksi imbalan, sanksi pidana berupa pidana utama dan pidana pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan<sup>2</sup>.

Pidana utama dari teori trisisa yaitu pidana mati, amputasi, denda, dera, penjara, pidana tutupan, kurungan, pengawasan, dan kerja sosial. Sedangkan pidana pelengkap berupa pidana tambahan dalam hukum nasional yang prinsipnya sebagai pelengkap. Sanksi tindakan berupa tindakan perbaikan dan tindakan perlindungan. Tindakan perbaikan ditujukan pada keadaan internal pelaku tindak pidana berupa perbaikan jiwa, akal, dan emosionalnya. Sedangkan tindakan perlindungan berupa pemulihan keseimbangan yang dibebankan kepada pelaku dan/atau keluarganya dan dapat juga diberlakukan kepada korporasi untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi. Sanksi imbalan berupa imbalan peniadaan dan imbalan pengurangan. Imbalan peniadaan berupa pengampunan Presiden atas eksistensi negara, pemerintah dan masyarakat. Sedangkan imbalan pengurangan berupa pemaafan absolut yang merupakan hak korban/ahli

---

<sup>2</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, 2017, Tiga Sistem Sanksi (trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional), *Legal Pluralism : Journal of Law Science*, vol.7, No.2. hlm.144

warisnya dan pemaafan relatif yang merupakan hak hakim/pemerintah dalam memberikan maaf<sup>3</sup>.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada pelaku tindak pidana<sup>4</sup>. **Herbert L. Packer**, menyebut sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya **Packer** menyatakan bahwa :

1. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*).Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana
2. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms*).Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancamanancaman dari bahaya
3. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it i s Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatener*)Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa<sup>5</sup>.

Sanksi pidana berupa pidana utama adalah sanksi pidana pokok yang ditetapkan pada suatu tindak pidana berdasarkan konstitusi. Sanksi pidana utama dimaksudkan dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *had* dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.174

<sup>4</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional, Makassar : Pascasarjana Unhas, hlm.203

<sup>5</sup> Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, hlm. 344-346.

hukum *hudud* yaitu sanksi yang sudah ditetapkan Allah dan rasullah serta sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang akan ditetapkan oleh pemerintah atas tindak pidana *ta'zir*. Pidana utama ini dapat dimaknai dalam hukum nasional sebagai pidana pokok baik dalam KUHP, Diluar KUHP, maupun RKUHPid<sup>6</sup>.

Pengaturan sanksi pidana diatur dalam buku I KUHP yang berlaku untuk semua tindak pidana baik di dalam KUHP maupun juga berlaku bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok (utama) dan pidana tambahan (pelengkap) sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana pokok yang dimaksudkan yaitu (a) Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, (d) Pidana denda, (e) Pidana tutupan. Sedangkan pidana pengawasan diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai pidana pokok untuk anak<sup>7</sup>.

Perubahan sanksi pidana pokok dimaksudkan sebagaimana tercantum di dalam RKUHPid adalah bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 66), sedangkan pidana kurungan sudah tidak diakomodir lagi, serta ada penambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jadi pidana pokok di dalam Pasal 65 ayat 1 RKUHPid yaitu (a) Pidana penjara, (b) Pidana tutupan, (c) Pidana pengawasan, (d) Pidana denda, (e) Pidana kerja sosial<sup>8</sup>.

Bahwa sanksi pidana utama dalam hukum pidana Islam adalah pidana yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, seperti pidana mati pada tindak pidana terhadap jiwa, kepentingan umum dan kepentingan negara. Pidana mati merupakan reaksi yang paling keras atas suatu tindak pidana tertentu yang mengancam eksistensi manusia sebagai individu, kelompok

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana .....*Op.Cit*, hlm.211

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> *Ibid*. hlm.212

masyarakat maupun kehidupan bernegara. Pidana mati tidak memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku pelanggaran norma-norma yang telah disepakati bersama sebagai tatanan hukum.

Sanksi pidana mati ataupun sanksi pidana yang lainnya dipastikan tidak akan bisa memberantas setiap tindak pidana hingga kehidupan manusia berakhir, namun diharapkan dapat mengurangnya atau mencegah tindak pidana dimaksud. Namun yang pertama dan utama dari sanksi pidana mati adalah semata-mata menjalankan perintah Allah SWT yang tertuang di dalam wahyu-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Israa' (17) : 33, yaitu:

“وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ إِلَى اللَّهِ تَارِعُونَ ﴿٣٣﴾  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهَا تَعْرَجُونَ ﴿٣٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٣٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٣٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٣٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٣٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٣٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٤٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٥٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٦٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٧٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٨٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٠﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩١﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٢﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٣﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٤﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٥﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٦﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٧﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٨﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿٩٩﴾  
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهَا رَاكِعُونَ ﴿١٠٠﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Akan tetapi, pemberlakuan sanksi pidana mati di dunia khususnya dalam hukum pidana nasional menuai pro dan kontra hingga saat ini. Antara yang menolak pidana mati (*Abolisionis*) dengan yang mempertahankan pidana mati (*Retensionis*). Di beritakan dalam beritasu.com<sup>9</sup> yaitu Amnesty International Indonesia mencatat bahwa pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan 47 vonis hukuman mati sepanjang tahun 2017. "Jumlah ini

<sup>9</sup> Lihat, beritasu, Sepanjang 2017, 47 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan, 12 April 2018, diakses pada tanggal 20 Mei 2018, <https://www.beritasu.com/nasional/487859/sepanjang-2017-47-vonis-hukuman-mati-dijatuhkan>

menurun dibandingkan pada tahun 2016 yang berjumlah 60 terpidana,". Amnesty International Indonesia mencatat pada tahun 2017, 33 hukuman mati diterapkan untuk kasus narkoba dan 14 untuk kasus pembunuhan. Sepuluh di antaranya dikenakan pada warga negara asing. "Ini berarti hingga akhir 2017, terdapat total 262 orang dipidana menunggu waktu eksekusi. Laporan Amnesty International Indonesia menyebutkan bahwa pada 2016 terdapat 14 orang yang diharuskan menjalani hukuman mati, namun Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi empat orang dari 14 orang terpidana mati. Adapun empat terpidana mati yang dieksekusi pada 2016 terdiri dari seorang warga negara Indonesia dan tiga warga negara asing yakni; Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), Freddy Budiman (Indonesia) dan Michael Titus Igweh (Nigeria). Sedangkan 10 terpidana mati yang eksekusinya ditunda terdiri atas Merri Utami (Indonesia), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria), Obina Nwajagu (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Federik Luttar (Zimbabwe), Eugene Ape (Nigeria), Pujo Lestari (Indonesia), dan Agus Hadi (Indonesia). Kemudian pada 2017 Indonesia tidak memberlakukan eksekusi mati, setelah memutuskan untuk menunda eksekusi 10 orang terpidana mati tersebut.

Penolakan akan pidana mati di Indonesia secara kontkrit dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kaum *abolisionis*, Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Salah satu argumentasi penolakan pidana mati adalah sanksi ini tidak efektif mengurangi angka kejahatan, sebagaimana diberitakan dalam detiknews <sup>10</sup> bahwa

---

<sup>10</sup> Lihat, detiknews, Hukuman Mati Dinilai Tak Kurangi Angka Kejahatan di Indonesia, 12 April 2018, diakses pada tanggal 20 mei 2018 <https://news.detik.com/berita/d-3968097/hukuman-mati-dinilai-tak-kurangi-angka-kejahatan-di-indonesia? ga=2.104340032.1590295929.1565057704-2074098685.1527036257>

Hukuman mati untuk gembong narkoba sudah dilakukan dalam tiga gelombang. Namun, Amnesty International Indonesia (AII) menilai hukuman mati tidak berdampak pada pengurangan jumlah kejahatan narkoba. "Fakta yang dapat mematahkan klaim pemerintah ialah jumlah kasus narkoba yang meroket ke angka 46.537 pada tahun 2017 atau 57,6 kali lebih tinggi dari angka yang tercatat pada tahun 2016 (yaitu) 807 (kasus), meskipun realita yang ada di Indonesia telah mengeksekusi empat pengedar narkoba di tahun sebelumnya,". klaim Indonesia bahwa eksekusi mati terpidana narkoba dapat memberantas kejahatan tidak berdasar. tidak ada bukti yang menerangkan hukuman mati adalah pencegah kejahatan lebih efektif dibanding penjara seumur hidup. "Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir bahkan ketika pemerintah telah mengambil garis keras dengan mengeksekusi terpidana karena kejahatan narkoba,". untuk solusi menangani masalah narkoba di Indonesia salah satunya adalah hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara sebagai pengganti hukuman mati. Selain itu, yang tak kalah penting adalah rehabilitasi untuk para pengguna maupun pengedar narkoba.

Berbeda dengan hukum positif, dalam hukum islam pidana mati bukan sanksi absolut yang diterapkan tetapi ada sanksi pidana antara maupun pidanan minimal berupa pemaafan dari korban dan atau keluarga korban berupa pidana diyat, sebagaimana yang digunakan oleh hukum pidana islam di negara Arab Saudi . Sebagi contoh kasus yang diberitakan detiknews<sup>11</sup> bahwa satu orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, yang telah divonis hukuman pancung oleh pemerintah Arab Saudi, bisa segera bebas.

---

<sup>11</sup> Lihat, detiknews, Dimaafkan Ahli Waris, WNI yang Divonis Pancung di Arab Bisa Bebas, 25 Maret 2018, diakses pada tanggal 20 Mei 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3935432/dimaafkan-ahli-waris-wni-yang-divonis-pancung-di-arab-bisa-bebas? ga=2.104340032.1590295929.1565057704-2074098685.1527036257>

TKI tersebut telah mendapatkan maaf dari ahli waris keluarga. kasus yang melibatkan TKI itu sudah berlangsung selama 16 tahun. pihak ahli waris dari korban WNI tersebut telah membuka pintu maaf. Dengan demikian, vonis mati terhadap TKI itu berpeluang besar untuk dibatalkan dan diganti dengan membayar uang ganti rugi. "Ahli waris keluarga sudah membuka peluang perdamaian penyelesaian vonis mati, dengan skema turun dari tuntutan vonis mati ke diyat/ganti rugi. keputusan hukuman pancung tersebut, ada di tangan pihak keluarga korban.

Realita ini memberi gambaran bahwa pidana mati yang diberlakukan memberikan fenomena akan pengaruh atau tidaknya sanksi terhadap angka kriminalitas, adanya pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati dalam hukum nasional dalam perspektif HAM maupun efektifitas sanksi terhadap peradaban umat manusia, serta alternatif dan solusi lain yang belum di kaji secara mendalam atas penerapan pidana mati sebagai bagian dari sistem sanksi yang efektif mempengaruhi perilaku kriminal.

Fenomena ini di sinyalir dapat ditemukannya konsep-konsep lain dari penerapan pidana mati baik sebagai sanksi pidana utama dengan tingkatan dan syarat-syarat tertentu yang ada dalam pesan ilahiyah. Sehingga kijian penulisan ini merupakan bagian dari upaya untuk mencari alternatif konsepsi dan narasi baru dalam sistem sanksi hukum pidana.

## PEMBAHASAN DAN ANALISA

### Pidana Mati Dalam KUHP

Menurut **Moeljatno** istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Ia menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana<sup>12</sup>. Serta menurut **Andi Hamzah**<sup>13</sup>,

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.1.



mengistilahkan hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Menurut **Roeslan Saleh** bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu<sup>14</sup>. Sedangkan menurut **Sudarto** bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa<sup>15</sup>.

Pidana mati merupakan cara untuk menghilangkan pelaku tindak pidana yang sudah tidak dapat diperbaiki atau melakukan perbuatan pidana tertentu yang tidak mungkin diampuni oleh hukum, karena kualitas perbuatannya dipandang mengancam ketertiban, ketenteraman dan rasa kemanusiaan.

Pidana mati yang diatur dalam buku I KUHP yaitu pasal 10 sebagai pidana pokok juga diatur di dalam beberapa tindak pidana di dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP yang terintegrasi dengan beberapa tindak pidana yang berat yaitu

- 1) Kejahatan terhadap negar<sup>16</sup>
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340)
- 3) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4)

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.27.

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4, hlm.9.

<sup>15</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.110.

<sup>16</sup> yaitu Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang), Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)

- 4) Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 368 ayat 2)
- 5) Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian (Pasal 444)

Sedangkan Sanksi pidana mati yang diatur dalam beberapa peraturan di luar KUHP, misalnya Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme, bahkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Berlakunya KUHP warisan belanda dengan adanya UU No. 1 Tahun 1945 untuk seluruh Indonesia, maka cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan digantung, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa: "Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher ter hukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung berlaku sampai dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, bahwa pelaksanaan penjatuhan pidana mati di Indonesia tidak lagi dilaksanakan dengan cara digantung, karena dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa bangsa Indonesia, untuk selanjutnya pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati ditempat penjatuhan hukuman pengadilan tingkat pertama oleh Regu tembak yang terdiri dari 1 perwira, 1 bintara, dan 12 tamtama dengan cara Berdiri, duduk, berlutut dengan Sasaran tembak jantung. Pidana mati dengan cara ditembak masih berlaku hingga sekarang.

### **Pidana Mati dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Pemberlakuan sanksi pidana mati di dalam hukum pidana nasional menuai pro dan kontra hingga saat ini. pandangan yang menolak pidana mati (*Abolitionis*) berbeda paradigma dengan pandangan yang mempertahankan pidana mati (*Retentionis*). Sehingga pidana mati tersebut menjadi wacana hukum pidana yang diperdebatkan di seluruh belahan dunia sejak abad ke 18, tepatnya sejak tahun 1764 ketika cesare beccaria mengatakan pendiriannya bahwa pidana mati tidak manusiawi dan tidak efektif.

Penolakan akan pidana mati di Indonesia secara kontkrit dilakukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pidana mati yang tertuang dalam undang-undang narkoba<sup>17</sup> bertentangan dengan konstitusi yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan<sup>18</sup>. Serta konstitusi menegaskan lagi bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun<sup>19</sup>.

Akan tetapi, melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkoba yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, namun Mahkamah berpendapat bahwa

---

<sup>17</sup> Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba,

<sup>18</sup> Pasal 28 A Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

<sup>19</sup> Pasal 28 I ayat 1 Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945

ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut<sup>20</sup>:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Mahkamah konstitusi secara jelas dan meyakinkan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun dengan konstitusi. Akan tetapi mahkamah konstitusi memberikan 4 rekomendasi sebagaimana diatas untuk dapat diakomodir dalam pembaharuan hukum pidana kedepan. Rekomendasi tersebut bukanlah suatu keharusan untuk diterapkan karena terpisah dari keputusan mahkamah konstitusi, kemudian mahkamah konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan atau rekomendasi untuk diakomodir dalam undang-undang. Hanya DPR dan presiden yang diberi kewenangan membuat undang-undang.

Sangatlah tepat keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena kelompok kontra pidana mati tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang pidana mati, hlm. 430-431

untuk meniadakan sanksi pidana mati di muka bumi ini, khususnya di Indonesia.

Dasar argumentasi kelompok *abolisionis* di beberapa literatur yaitu menyatakan kalau di negara-negara barat pidana mati sudah di hapuskan, penerapan pidana mati sama sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan, pidana mati bertentangan dengan HAM, pidana mati di dalam KUHP yang berasal dari negara asal belanda sudah dihapuskan, pidana mati berotientasi pembalasan dendam, serta hak untuk mencabut nyawa manusia hanya pada tuhan.

Argumentasi kelompok kontra pidana mati tersebut sudah terbantahkan dengan dasar argumentasi yang logis dan rasional disertai fakta, dasar hukum, landasan teori oleh Achmad Ali, dalam bukunya *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom, & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)*, argumentasinya antara lain:

Pertama: bahwa kampanye kelompok *abolisionis* yang menyatakan kalau di negara-negara barat pidana mati sudah di hapuskan. Faktanya tidak benar, bahwa Amerika Serikat sendiri, negara yang sering dijuluki “the leading democracy in the world”, dan yang saat ini sering dijuluki “the father of the human right”, masih menggunakan pidana mati, yaitu 38 dari 50 negara bagian di AS masih mempertahankan pidana mati dalam sistem peradilan mereka, bahkan mayoritas rakyatnya (sekitar 70 %) pendukung pidana mati termasuk beberapa presidennya. Bahwa 90 negara masih memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya termasuk beberapa negara Eropa, bahkan eksekusi mati terhadap para terpidana mati justru Amerika serikat dan cina yang tertinggi<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.32-35

Kedua: argumentasi kaum *abolisionis* yang menyatakan bahwa penerapan pidana mati sama sekali tidak terbukti mengurangi kejahatan tidaklah tepat. Contohnya diantara 100 pengedar narkoba, 50 orang di eksekusi pidana mati, maka sudah pasti tinggal 50 orang saja yang mengedarkan narkoba, serta menjadi preventif umum bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama<sup>22</sup>.

Ketiga: argumentasi yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM, adalah juga tidak tepat. Memang hak untuk hidup itu berlaku untuk semua orang, namun adanya pengecualian bagi para pelaku kejahatan serius, sadis dan kejam untuk dicabut hak hidupnya dikarenakan mengambil hak hidup orang lain yang sudah dicerainya. Justru para pelaku kejahatanlah yang paling melanggar HAM. Kalau hak untuk hidup dipahami tanpa batas dan syarat maka tentara dan kepolisian harus dibubarkan, semua jenis senjata yang dapat digunakan membunuh harus dimusnakan, para dokter dilarang keras membunuh seorang ibu walaupun untuk menyelamatkan bayinya atau sebaliknya. negara Indonesia dalam konstitusinya selain menjamin HAM, juga membolehkan HAM itu dibatasi, dengan syarat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau demi pertimbangan moral, ketertiban dan keamanan masyarakat (Pasal 28 j UUD 1945)<sup>23</sup>.

Keempat: bahwa pidana mati di dalam KUHP yang berasal dari negara asal belanda sudah dihapuskan, juga tidak benar karena belanda sendiri memberikan pengecualian pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan perang, kebijakan tersebut inkonsisten terhadap hak untuk hidup adalah hak mutlak setiap orang yang tak dapat ditawar-tawar lagi, apalagi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 35-38

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 38-44

tentara dan polisinya belum dibubarkan serta seluruh senjata sebagai alat yang rentan untuk membunuh belum dimusnahkan<sup>24</sup>.

Kelima: pandangan abolisionis bahwa pidana mati berorientasi pembalasan dendam juga kurang tepat, melainkan berdasarkan keyakinan moral bahwa kejahatan yang mereka lakukan, secara moral adalah kejahatan yang sangat berat dan meresahkan serta melukai perasaan moral keadilan masyarakat. Hanya pidana mati yang membuat seimbang neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat tersebut<sup>25</sup>.

Keenam: Pandangan kelompok anti pidana mati yang menyetakan bahwa hak untuk mencabut nyawa manusia hanya pada tuhan sudah diruntuhkan Alquran karena terbukti tuhan telah mendelegasikan haknya kepada manusia untuk melaksanakan eksekusi mati terhadap kejahatan serius. Bahkan dalam agama kristenpun pidana mati dibolehkan<sup>26</sup>.

### **Pidana Mati Dalam Kajian Hukum Islam**

Hukum Islam mengakui eksistensi sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana utama dari *jarimah hudud*, sebagaimana eksistensi pidana mati dalam hukum pidana nasional. Pidana mati dalam hukum pidana Islam dapat dilihat di dalam beberapa jarimah yang Allah sebutkan dalam Alquran maupun dari Rosulnya berupa Alhadis . Pidana mati diatur dalam Jarimah kisas atau *jinayah* untuk pembunuhan yang terdapat di dalamnya pemaafan dari korban atau ahli warisnya dan pidana mati dalam *jarimah hirabah* (gangguan keamanan). Sedangkan pidana mati yang masih berbeda pendapat oleh para fukaha adalah Jarimah al-baghy (pemberontakan) yang dianggap bukan bagian *hudūd* karena berkaitan dengan perang, *Jarimah Zina* berupa pidana

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 42-43

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 44-56

*rajam*, Jarimah Liwath, dan Jarimah Murtad yang dianggap sebagai tindakan disersi (penghianatan negara).

Hukum pidana Islam memberlakukan pidana mati terhadap semua jenis tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa seseorang, namun pidana mati ini terbagi menjadi dua yaitu pidana mati yang diberikan kepada tindak pidana yang menghilangkan nyawa karena melanggar kepentingan umum dan negara (meluas), misalnya menghilangkan nyawa karena *jarimah hirabah* dan *Jarimah al-baghy*. Sehingga pelanggaran terhadap tindak pidana tersebut selain ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya namun dapat juga diberikan pengampunan dari negara. Kemudian tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang atau keluarga tertentu (tidak meluas) dapat diberikan sanksi pidana mati namun sanksinya berupa kisas yang di dalamnya ada pemaafan dari korban atau ahli warisnya, serta dapat diganti dengan pidana *diyat* dan/atau pidana *ta'zir*.

Dasar pemberlakuan sanksi pidana mati dalam hukum Islam yang pertama terkait tindak pidana pembunuhan berupa pidana Kisas. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa kisas ialah persamaan dan keseimbangan antara tindak pidana dengan sanksi pidana atau memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya<sup>27</sup>. Pengertian lain yang mengatakan bahwa qisas adalah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau membunuh, atau dianiaya kalau menganiaya. Hukuman qisas dijatuhi atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja<sup>28</sup>.

**M. Arfin Hamid** menyebutnya dengan istilah jinayat yaitu pelanggaran terhadap badan yang didalamnya mewajibkan qishas. bentuk jinayat yang

---





















<sup>27</sup> Sabri Samin, 2007, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme Dan Pandangan Non Muslim*, Kholam Publishing, hlm. 128





















<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.V, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.279











































[illegible]





















Sumber hukuman kisas lainnya yaitu Allah SWT menginformasikan bahwa pidana kisas ini sudah diberlakukan pada kaum sebelumnya yaitu terhadap bani Israel dalam firmanNya, Q.S. Al-Ma'idah 5: 45 sebagai berikut:











































































































“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya...”.

[illegible]

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang

melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih<sup>29</sup>. Dan dalam *Qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Dari ketentuan dalam ayat Alquran tersebut dapat diperoleh kesimpulan menurut **Ahmad Azhar Basyir**<sup>30</sup> sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana asal dalam jarimah pembunuhan dengan sengaja adalah kisas.
- b. Antara pembunuh dan terbunuh, untuk dapat diterapkan pidana kisas, harus terdapat keseimbangan martabat.
- c. Keluarga korban diberi kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja, tidak menuntut hukuman kisas, diganti dengan pembayaran *diyat*. Dalam hal yang dituntut adalah pembayaran *diyat*, keluarga korban yang memaafkan supaya menagih pembayaran *diyat* dengan cara yang baik. Sebaliknya, pembunuhan yang dimaafkan supaya memenuhi pembayaran *diyat* dengan cara yang baik pula.

Selain perintah Allah SWT dalam Alquran tersebut, kisas atas pembunuhan juga terdapat dalam Alhadis rasulullah SAW, yaitu:

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw, Beliau bersabda, “Barang siapa yang dibunuh dan ia mempunyai keluarga, maka (pihak keluarganya) memiliki dua alternatif: boleh menuntut diat, boleh menuntut qhisash.” (HR.Muttafaqu’alai dan Muslim).

“Barangsiapa yang membunuh (orang tak bersalah) secara sengaja (dan terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh. Jika mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka menuntut diat, yaitu (membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina

---

<sup>29</sup> Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema’afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, hlm,15

berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat) dan tiga puluh jadza'ah (onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepadasi pembunuh sebagai imbalan perdamaian, maka ia (imbalan itu) untuk mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada diat. (Hasan: Shahih Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Sumber hukum Alquran dan Alhadis tersebut memberi penegasan akan adanya kisas untuk tindak pidana pembunuhan, namun Allah memberikan hak kepada wali korban. Serta adanya konsep pemaafan dari wali korban dengan atau tanpa meminta pembayaran *diyat*. Jadi wali korban memiliki dua pilihan, yaitu meminta kisas atau memaafkan tanpa syarat atau memaafkan dengan syarat membayar *diyat*.

**Makhrus Munajat**<sup>31</sup> menyebut sebagai *jarimah Qishash diyat* yaitu suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *Qishash* (serupa=semisal) atau hukum *diyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau ahlinya). Kejahatan yang masuk golongan *Qishash-diyat* ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah *qisas-diyat* ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan.

Pembunuhan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Pembunuhan tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada

---

<sup>31</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, hlm.165

unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik<sup>32</sup>.

Menurut **Abdul Qadir Audah**<sup>33</sup> bahwa hukum Islam membedakan antara hukuman pembunuhan sengaja dan hukuman pembunuhan semi sengaja. Perbuatan pertama dijatuhi hukuman kisas, sedangkan perbuatan yang kedua dikenai hukuman diat berat (*ad-diyatul mugallazah*). Perbedaan ini dikarenakan pada pembunuhan disengaja, pelaku berniat membunuh korban, sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, pelaku tidak berniat membunuh korban. Adanya perbedaan pada dua perbuatan tersebut mencegah adanya persamaan hukuman.

Pembunuhan semi sengaja yang di disebutkan oleh para fukaha memiliki kesamaan makna dalam hukum pidana nasional dengan sebutan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan sipelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.

Alasan lain adalah karena hukuman kisas menghendaki adanya keseimbangan antara apa yang diperbuat oleh pelaku dan apa yang diperbuat terhadapnya, sedangkan keseimbangan tersebut tidak akan ada. Ini karena pelaku pembunuhan semi sengaja tidak meniatkan matinya

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, hlm.24

<sup>33</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: Charisma Ilmu, hlm.72

korban, sedangkan bila si pelaku dijatuhi hukuman kisas (mati), berarti wali korban meniatkan kematian si pelaku, ini berarti tidak ada keseimbangan dan persamaan di dalamnya. Dalam hal ini, keadilan dan logika adalah dasar pembedaan antara hukuman tindak pidana pembunuhan disengaja dan pembunuhan semi sengaja<sup>34</sup>.

Selain itu **Abdul Qadir Audah** juga membedakan antara hukuman tindak pidana disengaja dan hukuman tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana disengaja dikenai hukuman kisas, sedangkan tindak pidana tidak disengaja dikenai diat ringan (*ad-diyatul mukhaffafah*). Alasannya, pada tindak pidana disengaja, pelaku menyengajakan ketika melakukan tindak pidana tersebut. Ia juga memikirkan dan mempersiapkan berbagai sarana untuk mewujudkan aksinya. Dengan demikian, ia dapat mewujudkan kepentingan-kepentingan moral atau materiil. Adapun pada tindak pidana tidak disengaja, pelaku tidak menyengajakan tindak pidana atau memikirkannya serta tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukannya. Dalam hal ini, kelalaian dan ketidakhati-hatian pelaku telah mengakibatkan terjadinya perbuatan yang membentuk tindak pidana, di mana pikirannya tidak tertuju kepada perbuatan itu sendiri.

Jadi sanksi pidana kisas hanya berlaku untuk pembunuhan disengaja berupa pidana mati, sedangkan pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak disengaja serta tindak pidana yang berkaitan dengan badan berlaku sanksi *diyat* dengan kategori yang berbeda.

Misalnya salah satu penjahat yang di halalkan darahnya oleh rasulullah (boleh di hukum mati) pada peristiwa fathul makkah adalah Abdullah Bin Al-Khathal dari keturunan bani taim bin ghalib yang pernah menjadi seorang muslim, kemudian rasulullah mengutusnyanya untuk suatu keperluan dengan penuh kepercayaan di sertai oleh seorang laki-laki dari

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Anshar muslim yang membawa serta pula pembantunya yang setia melayaninya. Abdullah bin Al-khathal keluar dari rumah dan memerintahkan pembantunya untuk menyembelih seekor kambing jantan dan memasak makanan untuknya, kemudia ia tidur. ketika terbangun, ternyata sang pembantu belum melakukan Sesutu (tidak menyembelih kambing dan memasak makana). maka Al-Khathal menganiaya pembantunya sampai mati. kemudian ia pun murtad dan kembali menjadi seorang musyrik<sup>35</sup>. Setelah Pembebasan Mekkah, Al-Khathal membungkus dirinya dengan tirai Ka'bah. Ketika Muhammad tahu, ia memerintahkan agar Bin Khatal dibunuh di sana. Abu Burzah dan Sa'id bin Harits melaksanakan hukuman matinya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim<sup>36</sup>.

Selain itu, pidana kisas diberlakukan juga kepada Miqyas bin Subabah yaitu saudara laki-laki Hisyam bin Subabah. Ketika penyerbuan Dzu Qarad, seorang Anshar secara tak sengaja ia membunuh Hisyam. Setelah kejadian ini, Miqyas pindah ke Madinah dan menjadi Islam. Ia meminta ganti rugi pada Muhammad atas kematian kakaknya. Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi. Beberapa hari kemudian, ia membunuh orang yang membunuh kakaknya dan kemudian ia melarikan diri ke Mekkah dan memberontak. Ia dijatuhi hukuman mati yang kemudian dijalankan oleh Abdullah Laitsi dengan memenggal kepala Miqyas<sup>37</sup>.

Selanjutnya Wahsyi bin Harb yang bertanggung jawab atas kematian Hamzah, paman Muhammad. Setelah pembunuhan itu, ia melarikan diri dari

---

<sup>35</sup> Mengapa Rasulullah Memutuskan Hukuman Mati Bagi Abdullah Bin Al-Khathal?, diakses pada tanggal 22 Mei 2018, <https://mizanuladyan.wordpress.com/2012/12/29/mengapa-rasulullah-memutuskan-hukuman-mati-bagi-abdullah-bin-al-khathal/>

<sup>36</sup> Ensiklopedia bebas, Daftar orang yang dijatuhi hukuman mati dalam Pembebasan Mekkah, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_orang\\_yang\\_dijatuhi\\_hukuman\\_mati\\_dalam\\_Pembebasan\\_Mekkah](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_orang_yang_dijatuhi_hukuman_mati_dalam_Pembebasan_Mekkah).

<sup>37</sup> *Ibid.*

Mekkah ke Tha'if. Sebelum, Muhammad tinggal di Madinah, ia memohon ampun padanya dan masuk Islam. Ia juga ikut bertempur melawan nabi palsu, Musailamah pada masa Khalifah Abu Bakar dan memancung Musailamah dengan senjata yang sama yang digunakan untuk membunuh Hamzah<sup>38</sup>.

Pidana mati juga berlaku pada *jarimah hirabah*. Menurut **As-Sayid Sabiq** bahwa *jarimah hirabah* sama dengan *qat'u tariq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi<sup>39</sup>. Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencurian. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis. Misalnya merampok, mengancam atau menakut-nakuti orang<sup>40</sup>. Terhadap gangguan keamanan (*hirabah*) dikenakan empat hukuman, yaitu hukuman mati biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan serta kaki dan pengasingan<sup>41</sup>.

Pidana mati terhadap *hirabah* yaitu hukuman mati dan disalib, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Maidah (5) :33.



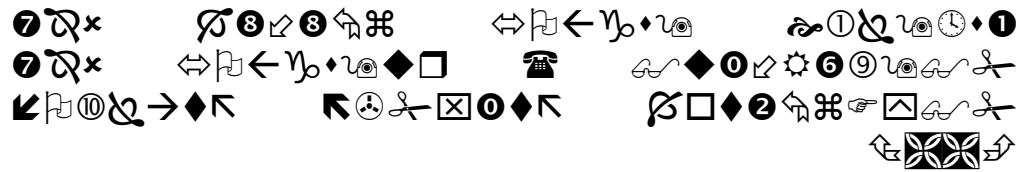
<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia....Op.Cit.*, hlm,153

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam.....Op.Cit.*, hlm.69

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....Op.Cit.*, hlm,273-274.





“Sesungguhnya pembalasan (hukuman) terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik<sup>42</sup>, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar”.

Menurut **As-Sayid Sabiq** bahwa sanksi bagi Jarimah hirabah berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi perbuatannya, bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka hanya dihukum penjara<sup>43</sup>.

Lebih lanjut **As-Sayid Sabiq** menguraikan bahwa menurut imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat diatas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat imam Syafi'i, imam Ahmad dan imam Zaidiyyah adalah hukuman mati lalu disalib, sedangkan menurut imam abu hanifah, ulil amri dapat memilih apakah potong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukau disalib saja. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa dalam ayat diatas berfungsi sebagai takhyir (pilihan). Maka imam dapat memilih alternatif diantara empat hukuman yang ditentukan dalam Alquran yaitu

<sup>42</sup> Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

<sup>43</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia....Op.Cit*, hlm.154

hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas<sup>44</sup>.

Menurut **Abdul Qadir Audah** bahwa pidana mati wajib dijatuhkan kepada pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan. Hukuman ini adalah hukuman *hudud*, bukan kisas, sehingga tidak bisa dimaafkan oleh wali korban. Hukuman ini didasarkan atas ilmu pengetahuan dan karakter manusia. Ketika melakukan pembunuhan, pelaku *hirabah* didorong oleh motivasi/naluri untuk hidup. Bila ia menyadari bahwa ketika membunuh orang lain itu sebenarnya ia membunuh dirinya sendiri, biasanya ia tidak akan meneruskan perbuatannya. Jadi, hukuman mati yang telah ditetapkan oleh hukum Islam akan menolak faktor-faktor psikologis yang mendorong dilakukannya pembunuhan dengan satu-satunya faktor psikologis yang dapat mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut<sup>45</sup>.

**Abdurrahman al-Maliki ad-Daur**<sup>46</sup> menyebut *hirabah* dengan istilah pembegal (*qutha'l ath*). Had bagi seorang pembegal akan dijatuhkan apabila telah terpenuhi fakta tentang *qutha at-thariq* telah terpenuhi yaitu :

1. Terjadi diluar kota. Bisa terjadi di pedesaan, pegunungan, dataran luas, tanah luas, bisa juga terjadi dalam kereta api, pariwisata atau mobil di luar kota. Qutha' at-thariq hanya terjadi di tempat yang jauh dari pertolongan yang bisa datang dengan cepat. Namun jika mereka menyerang kota membunuh, merampas dan melakukan teror maka mereka juga dianggap melakukan qutha' at-thariq dan tetap ditetapkan had qutha' at-thariq atas mereka.
2. Mereka membawa persenjataan untuk membunuh seperti pedang, senapan, senapan otomatis, golok atau pisau yang bisa membunuh.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm.154-155

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah...*, *Op.Cit.*, hlm.60

<sup>46</sup> M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm.252-253

3. Mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda secara paksa dan menetap ditempat-tempat mereka.

**Al-Qurthubi** menjelaskan tentang ayat tersebut yaitu bahwa para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut pelaku hirabah. Imam Malik berkata: pelaku hirabah menurut kami ialah orang yang menyengsarakan masyarakat, baik di dalam kota maupun diluar kota. Si pelaku membunuh dan merampas harta mereka bukan karena perseteruan, permusuhan dan dendam kesumat, imam Malik menyatakan bahwa perampok semata-mata ingin menguasai harta kekayaan korban, bukan karena masalah-masalah lain yang terjadi sebelumnya<sup>47</sup>.

Sedangkan hukuman mati disalib, Hukuman ini wajib dijatuhkan terhadap pengganggu keamanan yang melakukan pembunuhan dan perampasan harta. Jadi, hukuman ini dijatuhkan atas pembunuhan dan pencurian harta sekaligus. Artinya, hukuman ini adalah hukuman atas dua tindak pidana, baik kedua tindak pidana tersebut saling berhubungan maupun pembunuhan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah melakukan perampasan harta. Hukuman ini juga merupakan hukuman *hudud*, bukan kisas. Karenanya, tidak bisa dimaafkan oleh wali korban<sup>48</sup>.

Menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, hukuman mati didahulukan dari pada penyaliban, karena nas Alquran mendahulukan penyebutan hukuman mati dari pada hukuman salib sehingga pelaksanaan hukumannya harus didahulukan demikian. Selain itu, penyaliban sebelum hukuman mati adalah penyiksaan terhadap terdakwa, sedangkan hukum Islam melarang adanya penyiksaan. Demikian juga, penyaliban bukanlah hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah (*rad'*) si pembunuh, sebab

---

<sup>47</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH, hlm, 123-124

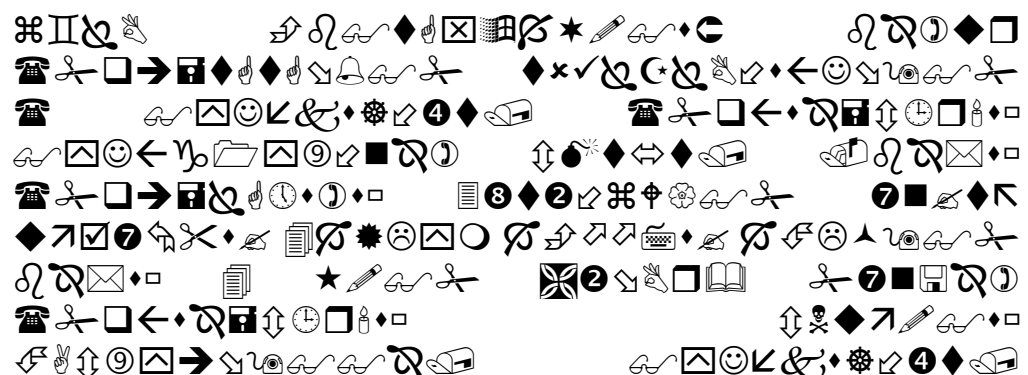
<sup>48</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqararananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah...*, Op.Cit., hlm.60-61

seandainya dapat mencegah, tentulah hukuman mati akan menyerap hukuman penyaliban, sebagaimana aturan-aturan hukum Islam. Hukuman penyaliban hanya dimaksudkan sebagai pencegahan umum (*zajr* : prevensi umum), yang maksudnya adalah untuk penyiaran berita kepada yang lain (agar tidak meniru perbuatannya)<sup>49</sup>.

Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk menyiarkan telah terjadi eksekusi pidana mati kepada khalayak umum. Jadi pidana ini sesungguhnya adalah pidana mati namun kematian pelaku tersebut harus disiarkan melalui media elektronik maupun cetak, jadi tidak perlu harus disalib. Tujuannya untuk memberikan pencegahan terhadap orang lain.

Selanjutnya hukuman mati yang menjadi perdebatan dan perbedaan pandangan diantara para fukaha adalah sanksi pidana mati dalam beberapa jarimah yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam Alquran, tetapi sanksinya hanya disebutkan di dalam Alhadis . Tindak pidana dimaksud adalah jarimah makar / pemberontakan (*bughat* / *al-Baghyu*) jarimah zina *muhsan* berupa sanksi *rajam* dan *jarimah* murtad.

Sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam dapat juga dilihat pada tindak pidana Pemberontakan. Dasar ketentuan ini adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat (49) : 9 yaitu:



<sup>49</sup>*Ibid.* hlm.61



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Juga Alhadis rasulullah SAW sebagai berikut:

“Barangsiapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan mempersengketakan kekuasaan (imam) maka panggAllah leher orang tersebut” (H.R. Muslim).

Tindak pidana pemberontakan ditujukan kepada sistem hukum dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, hukum Islam bersikap keras karena apabila bersikap memudahkan, akan timbul fitnah, kekacauan, dan ketidakstabilan yang pada akhirnya akan menyebabkan kemunduran dan kehancuran masyarakat umum. Tidak diragukan lagi bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling mampu mencegah manusia dari melakukan tindak pidana ini yang biasanya didorong oleh keserakahan serta mencintai kemuliaan dan kekuasaan. Seluruh negara pada masa kini menetapkan hukuman mati bagi setiap pelaku pemberontakan, hukuman sama yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terhadap tindak pidana tersebut<sup>50</sup>.

Pelaku Bughat adalah orang-orang yang melawan Daulah Islamiyah, mereka memberontak terhadap negara dan melakukan perlawanan-perlawanan radikal dan mengumumkan perang terhadap Daulah Islamiyah<sup>51</sup>. Sehingga tindakan yang pertama yaitu melakukan perdamaian, apabila

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 66

<sup>51</sup> M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan.....*, Op.Cit., hlm.252

dindahkan maka diperangi hingga mati dalam peperangan atau dihukum mati saat ditangkap. Namun yang diutamakan adalah perdamaian dengan pemberian sanksi imbalan dalam bentuk pengampunan kepala negara.

Misalnya Huwairits bin Nafidz bin Wahab yaitu seorang pujangga yang terkenal karena penghinaannya yang besar terhadap Muhammad dan kebenciannya yang mendalam terhadap Islam. Ketika Abbas bin Abdul Muthalib bersama Fatimah dan Ummi Kultsum sedang dalam perjalanan dari Mekkah ke Madinah dengan unta, ia membuntutinya dan menusuk unta tersebut dengan lembing, sehingga unta melonjak dan Fatimah terjatuh dari punggung unta. Ia dijatuhi hukuman mati dan Ali yang melaksanakan<sup>52</sup>.

Ikrimah bin Abu Jahal adalah termasuk pemberontak Islam seperti ayahnya. Setelah Pembebasan Mekkah, ia pergi dari Mekkah ke Yaman karena tidak mungkin tinggal di Mekkah lagi. Istrinya, Ummi Hakim binti Harits, yang sudah Islam memohon kepada Muhammad agar suaminya diampuni. Permintaan tersebut dikabulkan. Maka, ia menjemput suaminya di Yaman. Setelah kembali ke Mekkah, suaminya akhirnya masuk Islam. Ikrimah meninggal di Ajnadin dalam perang di masa kekhalifahan Abu Bakar<sup>53</sup>.

Habbar bin al-Aswad merupakan penanggung jawab atas pembantaian besar-besaran umat Muslim. Ketika Zainab, putri Muhammad dalam perjalanan menuju Madinah dari Mekkah, untanya ditusuknya dengan linggis sehingga unta meronta-ronta dan Zainab terjatuh. Zainab yang saat itu sedang hamil mengalami keguguran. Muhammad menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ia kemudian mohon ampunan kepada Muhammad. Permohonan itu dikabulkannya<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Ensiklopedia Bebas, *Loc.Cit*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Selanjutnya adalah pidana mati berupa *rajam* terdapat dalam tindak pidana zina untuk pelaku muhsan (sudah menikah). Menurut **Abdurrahman Doi** bahwa zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya tidak terikat dalam hubungan perkawinan<sup>55</sup>. Para fukaha mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan *Zakar* (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat<sup>56</sup>.

Menurut **Abdul Qadir Audah**<sup>57</sup> bahwa Hukuman *rajam* ditetapkan bagi pelaku zina *muhsan*, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. *Rajam* adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Hukuman *rajam* tidak termaktub dalam Alquran. Karena itu, kaum Khawarij mengingkari hukuman ini. Menurut mereka, tindak pidana zina, baik *muhsan* maupun *gair muhsan*, hanya dijatuhi hukuman dera. Fukaha selain golongan Khawarij menyepakati keberadaan hukuman *rajam*. Alasan mereka, hukuman *rajam* pernah dijatuhkan oleh rasulullah SAW dan oleh ijmak sahabat sesudahnya. Di antara Alhadis yang berkaitan dengan hal ini adalah:

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan *dirajam* (H.R. Muslim).

Sebagian ulama menyatakan bahwa pezina yang belum menikah dijilid (dicambuk ) sebanyak 100 kali cambukan, sedangkan pezina *muhsan* *dirajam* hingga mati. rasulullah SAW telah *merajam* Ma'iz. seperti yang

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam.....Op.Cit.*, hlm.37

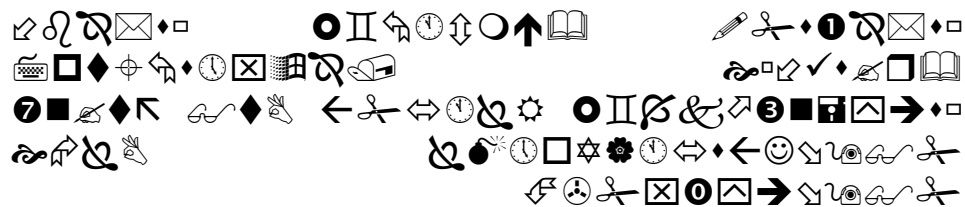
<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iy, Muassasah Ar-Risalah...*, *Op.Cit.*, hlm. 47, lihat juga Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, *Op.Cit.*, hlm.267

diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: “bahwa seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Nabi SAW memerintahkan untuk menjilidnya, kemudian ada kabar bahwa ia adalah *muhshan*, maka Nabi Saw memerintahkan untuk *merajamnya*”. Didasarkan pada fakta bahwa rasulullah SAW telah *merajam* Ma'iz setelah ditanya kemuhshannya, beliau juga *merajam* Ghamidiyyah dan lainnya yang tersebut dalam hadits-hadits sahih. hadits-hadits ini telah mengkhususkan ayat di atas, yaitu bahwa lafadz *az-zaniyyah* dan *az-zaniy* khusus bagi *ghairu muhshan* dan yang dikecualikan bagi yang *muhshan*. Pengkhususan Alquran dengan Sunnah hukumnya *ja'iz* (boleh)<sup>58</sup>.

**Abdurahman al-Jaziri** menyatakan bahwa golongan khawarij, *mu'tazilah* dan sebagian fuqaha syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).<sup>59</sup> Adapun alasan mereka yang menolak hukum *rajam* menurut **Ali as-Sayyis**<sup>60</sup> adalah:

1. Hukum *rajam* dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam alquran. Seandainya Allah melegalkan hukum *rajam* mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.
2. Hukuman bagi hamba sahaya separuh dari orang merdeka, kalau hukum *rajam* dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separuh mati. Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah surah An-Nisa ayat 25:



<sup>58</sup> M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan.....*, Op.Cit., hlm.244

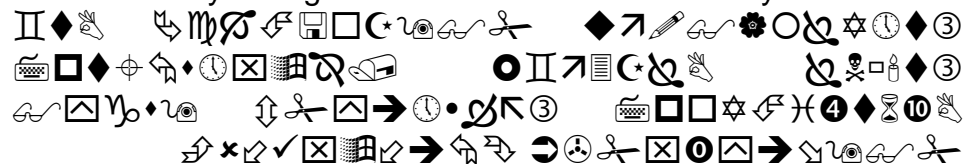
<sup>59</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia....* Op.Cit, hlm.136-137

<sup>60</sup>. Ibid. hlm.138



“... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka...”

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum *rajam* tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surah An-Nisa ayat 25 adalah separuh, yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surah Al-Ahzab ayat 30.



“Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina), maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...”

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum *rajam* tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surah An-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Sementara Alhadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum *rajam* adalah lemah.

Menurut **Hasbi ash-Shiddieqy**, hukum *rajam* ada dan dipraktikkan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surah An-Nur ayat (2). Maka hukum yang *muhkam* sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.<sup>61</sup> Sebagaimana Alhadis riwayat Abdullah bin Abu Afa ra:

Dari Syaibani ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abu Afa: Apakah rasulullah SAW. pernah merajam? Ia menjawab: Ya. Aku bertanya: Apakah hal itu sesudah turunnya surah An-Nur atau sebelumnya? Dia menjawab: Aku tidak tahu (H.R. Muslim)

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.139

Jadi menurut **Asghar Ali Engineer** bahwa perintah rasul untuk menghukum *rajam* bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

1. Hukum *rajam* pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya adalah kitab mereka yakni taurat.
2. Diterapkannya hukum *rajam* pada masa Nabi adalah ketika surah An-Nur ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surah An-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali.
3. Rasulullah menghukum *rajam* di kala itu bukan sebagai hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*<sup>62</sup>.

Selanjutnya pidana mati terhadap tindak pidana *riddah* murtad yang bersumber pada sabda rasulullah SAW yaitu "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia" (H.R. Imam Bukhari).

Murtad adalah meninggalkan dan keluar dari agama Islam setelah ia memeluknya. Seseorang baru dapat disebut murtad apabila sebelumnya ia adalah seorang muslim. Pidana mati dalam tindak pidana *Riddah* (murtad) tidak disebutkan dalam Alquran tetapi hanya dalam Alhadis yaitu "Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia". Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh. Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam<sup>63</sup>.

Misalnya yang terjadi pada Abdullah bin Sa'd. Sebelumnya ia merupakan seorang Muslim yang diperintahkan menulis kumpulan firman-

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm.139-140

<sup>63</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia....Op.Cit*, hlm. 163

firman Allah, namun ia berkhianat dan bergabung dengan pemberontak. Setelah Pembebasan Mekkah, ia dijatuhi hukuman mati. Kemudian ia mengungsi ke saudara sepersusuaannya, Utsman bin Affan. Utsman memberinya suaka, dan membawanya ke hadapan Muhammad dan memohon agar ia diampuni<sup>64</sup>.

**Syekh Mahmud Syaltut** yang dikutip H.A. Djazuli bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam. Serta **Hasbi ash-Shiddieqy** mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam Alquran tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman *ta'zir*<sup>65</sup>.

Hukum Islam sangat mengakui eksistensi dari pidana mati sebagaimana diuraikan diatas yaitu terkait dengan tindak pidana (*Jarimah*) kisas atau *jinayah* untuk pembunuhan, *jarimah hirabah* (gangguan keamanan), serta *Jarimah al-baghy* (pemberontakan / subversi). Walaupun demikian, terdapat konsep pemaafan dari korban atau keluarganya dan konsep pengampunan dari pemimpin negara yaitu presiden.

### **Pidana Mati dalam Upaya Pembaharuan KUHP**

Walaupun hukum Islam membolehkan karena sebagai pidana *hudud*. Namun rekomendasi Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian dirumuskan di

---

<sup>64</sup> Ensiklopedia Bebas, *Loc.Cit*

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm .164

dalam rancangan KUHP yang terbaru saat ini, sebagaimana tertuang di dalam RKUHPid bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif<sup>66</sup>. Sebagai catatan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat<sup>67</sup>.

Sedangkan pelaksanaannya dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak dan tidak dilaksanakan di muka umum. Sedangkan Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Serta eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden<sup>68</sup>.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika (a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (d) ada alasan yang meringankan. Namun apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Akan tetapi, apabila terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan<sup>69</sup>.

Selanjutnya, Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana

---

<sup>66</sup> Pasal 66 RKUHPid

<sup>67</sup> Pasal 87 RKUHPid

<sup>68</sup> Pasal 88 RKUHPid

<sup>69</sup> Pasal 89 RKUHPid

melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden<sup>70</sup>.

Pembaharuan sanksi pidana mati sebagaimana tercantum dalam RKUHPid tersebut, menunjukkan suatu rumusan kompromi untuk mengakomodir kelompok pro dan kontra pidana mati. Namun rumusan tersebut jadi tidak sesuai dengan ruh hukum Islam lagi, karena melewati batas-batas Allah SWT, yaitu justru dijadikan sebagai pidana alternatif dan bahkan hukumannya dapat ditunda hingga dapat ditiadakan pidana mati dengan pidana lain.

Adanya kesadaran untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yaitu perubahan KUHPP dengan adanya RKUHPid diharapkan untuk mengakomodir hak Allah tersebut minimal sebagai bagian dari perlindungan spiritualitas mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia.

Hingga saat ini, rumusan pidana mati dalam RKUHPid dimaksudkan justru sebagai rancangan kompromi atas kaum *Abolitionis* dan *Retentionis*. Inilah kecenderungan dan tabiat manusia yang hanya mau menjalankan suatu norma yang dapat menguntungkan saja, apabila ada norma yang merugikan atau menyakitkan pasti ditinggalkan. Apalagi norma tersebut adalah norma agama yang secara langsung tidak memberikan efek sanksinya kepada mereka yang melakukan pelanggaran, kecuali sanksi tersebut sudah dilegalkan dalam hukum buatan manusia.

Sanksi pidana ini sebagai sanksi *hudud* yang merupakan hak Allah, maka sebagai orang yang meyakini agamanya, sudah seharusnya mengakomodir sanksi tersebut dalam pembaharuan hukum pidana nasional saat ini, sebagai wujud ketundukan hamba kepada penciptanya. Bukankah dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, Hai orang-orang

---

<sup>70</sup> Pasal 90 RKUHPid

yang berakal. Jadi diantara 10 pembunuh sadis, kalau ada seorang yang dikenakan pidana mati maka sudah tentu tinggal 9 orang saja.

Sesungguhnya pidana mati dalam hukum Islam tersebut hanya berkaitan dengan tindak pidana yang menghilangkan nyawa, dan menghilangkan eksistensi negara atau pemerintah. Hanya terdapat pada jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan dan jarimah perampokan. Jadi dasarnya adalah semua tindak pidana yang menghilangkan nyawa dan menghilangkan eksistensi pemerintah pidana maksimalnya adalah sanksi pidana mati sedangkan pidana minimalnya adalah sanksi imbalan peniadaan.

Sebagaimana yang dikatakan syahrur dengan teori yang aplikatif, yakni *nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas)*. Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd aladna/minimal*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la/maksimal*). jadi tidak perlu adanya kekhawatiran terhadap pelaku kriminal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap tindakannya. Karena ketentuan tersebut akan menjadi kewenangan hakim untuk dapat menerapkan hukum diantara batas maksimal dan batas minimal.

Dari teorinya tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun ada batas sanksi maksimal adalah pidana mati, namun tidak langsung menerapkannya tetapi dapat diganti dengan pidana lain misalnya penjara, karena masih berada dalam batas maksimal dan batas minimal. Pandangan syarur dengan teorinya ini sangatlah tepat kalau diterapkan pada negara yang menjadikan Alquran sebagai konstitusi tertinggi bersama dengan Alhadis rasulullah sebagai undang-undang misalnya negara Arab Saudi. Maka manusia dapat dengan bebas menentukan sanksi hukum pidana. Sanksi pidana mati di negara Arab Saudi terkait dengan tindak pidana kisas, perampokan, pemberontakan, *rajam*, murtad, sesuai yang ada dalam Alquran dan dalam menentukan sanksinya dapat ditentukan lain. Jadi disini batas maksimal itu tertuang dengan jelas (kepastian hukum).

Pidana mati sebagai sanksi maksimal dan imbalan peniadaan merupakan sanksi minimal dalam konsep kajian ini adalah suatu penjabaran dari salah satu tujuan negara dalam konstitusi sebagaimana dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alenia 4 menyebutkan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Salah satu perlindungan negara terhadap rakyat dan pemerintah adalah saran hukum pidana. Perlindungan dari para pelaku kriminal maupun musuh dan penghianat bangsa dan negara.

Pidana mati dalam hukum nasional bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan kriminal yang menghilangkan nyawa maupun mengganggu eksistensi bangsa dan negara. namun dapat juga bertujuan untuk pencegahan sebagai bentuk penghilangan para pelaku kriminal yang sadis dalam melakukan aksi kriminalnya untuk memusnahkan umat manusia, bangsa dan negara. Penerapan sanksi pidana mati sesungguhnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan hukum pidana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitas tujuan tersebut bahkan tidak menunjukkan unsur keadilan terhadap korban, tidak pula memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai jaminan untuk memberi rasa aman, tentram dan damai, dimana sering terjadi kasus pembunuhan bahkan tubuh korban di amputasi untuk menghilangkan jejak. Maka dengan demikian sudah tentu tujuan hukum untuk pemanfaatan tidak pula terealisasi.

Jadi pidana mati bukan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum atau pemanfaatan sebagai tujuan hukum namun lebih tinggi lagi dari tujuan tersebut adalah untuk mewujudkan keseimbangan. Tujuan hukum dimaksud adalah bahwa hukum ada dan dibuat ada sesungguhnya hanya untuk mewujudkan keseimbangan. sedangkan untuk mewujudkan keseimbangan harus dengan terwujudnya keadilan, kepastian dan

pemanfaatan sebagai bagian dari proposisi dari tujuan hukum. Proposisi tersebut saling menstabilisasi bagian hukum ketika bagian hukum lain diwujudkan.

Pidana mati yang dimaksudkan dalam hukum nasional baik yang berlaku sekarang apalagi rancangannya hanya berorientasi pada tujuan di dunia saja. Walaupun tujuan pemidanaan pidana nasional untuk memelihara jiwa tetapi berbeda dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memelihara jiwa dan memelihara agama (negara) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.

Pidana mati bukan bertujuan untuk pembalasan, sebagaimana teori tujuan pemidanaan yang absolut, atau sebagai pencegahan sebagaimana tujuan pemidanaan yang relatif, atau gabungan keduanya, tetapi pidana mati merupakan suatu jaminan dari yang menciptakan manusia ini untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi logika sederhana adalah apabila pidana mati ditiadakan maka dengan sendirinya manusia telah mencabut jaminan kelangsungan hidupnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pidana mati yang diatur di dalam KUHP yaitu pasal 10 sebagai pidana pokok juga diatur di dalam beberapa tindak pidana di dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP dalam bentuk peraturan perundang-undangan. melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-V/2007 bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia maupun dengan konstitusi, namun Mahkamah merekomendasikan bahwa Pidana mati bukan



lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Demikian pula dalam Hukum Islam mengakui eksistensi pidana mati sebagai sanksi pidana utama dari *jarimah hudud*. Pidana mati diatur dalam Jarimah kisas atau *jinayah* untuk pembunuhan yang terdapat di dalamnya pemaafan dari korban atau ahli warisnya dan pidana mati dalam *jarimah hirabah* (gangguan keamanan). Sedangkan pidana mati yang masih berbeda pendapat oleh para fukaha adalah Jarimah al-baghy (pemberontakan) yang dianggap bukan bagian *hudud* karena berkaitan dengan perang, Jarimah Zina berupa pidana *rajam*, Jarimah Liwath, dan Jarimah Murtad yang dianggap sebagai tindakan disersi (penghianatan negara). Pidana mati dalam hukum Islam tersebut hanya berkaitan dengan tindak pidana yang menghilangkan nyawa, dan menghilangkan eksistensi negara atau pemerintah. Hanya terdapat pada jarimah pembunuhan, jarimah pemberontakan dan jarimah perampokan. kemudian di dalam pasal 66 dan pasal 87 rancangan KUHP bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Serta pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Jadi dasarnya adalah semua tindak pidana yang menghilangkan nyawa dan menghilangkan eksistensi pemerintah pidana maksimalnya adalah sanksi pidana mati sedangkan pidana minimalnya adalah sanksi imbalan peniadaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Qadir Audah, 2008, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqarananbil Qanunil Wad'iyy, Muassasah Ar-Risalah. (diterjemahkan oleh tim tsalisah) Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, Bogor: Charisma Ilmu.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet. V*, Jakarta: Bulan Bintang.

Ahmad Rifai Rahawarin, 2015, *Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum Pidana Nasional*, Makassar : Pascasarjana Unhas.

\_\_\_\_\_, 2017, Tiga Sistem Sanksi (trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional), *Legal Pluralism : Journal of Law Science*, vol.7, No.2.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.

M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif KelIndonesiaan (Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

M.Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: AMZAH.

Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru Cet. 4.

Sabri Samin, 2007, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia Eklektisisme Dan Pandangan Non Muslim*, Kholam Publishing.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika.

## B. Internet

beritasatu, Sepanjang 2017, 47 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan, 12 April 2018, diakses pada tanggal 20 Mei 2018, <https://www.beritasatu.com/nasional/487859/sepanjang-2017-47-vonis-hukuman-mati-dijatuhkan>

detiknews, Hukuman Mati Dinilai Tak Kurangi Angka Kejahatan di Indonesia, 12 April 2018, diakses pada tanggal 20 Mei 2018

<https://news.detik.com/berita/d-3968097/hukuman-mati-dinilai-tak-kurangi-angka-kejahatan-di-indonesia? ga=2.104340032.1590295929.1565057704-2074098685.1527036257>

detiknews, Dimaafkan Ahli Waris, WNI yang Divonis Pancung di Arab Bisa Bebas, 25 Maret 2018, diakses pada tanggal 20 Mei 2018, <https://news.detik.com/berita/d-3935432/dimaafkan-ahli-waris-wni-yang-divonis-pancung-di-arab-bisa-bebas? ga=2.104340032.1590295929.1565057704-2074098685.1527036257>

Mengapa Rasulullah Memutuskan Hukuman Mati Bagi Abdullah Bin Al-Khathal?, diakses pada tanggal 22 Mei 2018, <https://mizanuladyan.wordpress.com/2012/12/29/mengapa-rasulullah-memutuskan-hukuman-mati-bagi-abdullah-bin-al-khathal/>

Ensiklopedia bebas, Daftar orang yang dijatuhi hukuman mati dalam Pembebasan Mekkah, diakses pada tanggal 22 Mei 2018 [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_orang\\_yang\\_dijatuhi\\_hukuman\\_mati\\_dalam\\_Pembebasan\\_Mekkah](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_orang_yang_dijatuhi_hukuman_mati_dalam_Pembebasan_Mekkah).